

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dwiputrianti, O Septiana *et.al*, tt., *Draft Naskah Akademis RUU SPIP, USAID & KemenPan-RB*. Jakarta
- Ikhwansyah, Isis. 2019. *Hukum Perusahaan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Kamelus, Deno. 2004. *Arti dan Kedudukan Perencanaan dalam Hukum Administrasi Negara, dalam Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press. Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 1981, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Lembaga. 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku II: Agenda Pembangunan Bidang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, hal. 136.
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Bogor
- Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302).
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menteri Badan Usaha Milik Negara.

## **SKRIPSI**

- Dhenis Prabowo Sakti, Tesis : Status Negara Dalam Anak Perusahaan BUMN Dan Akibat Hukum Akta Pendirian Atau Penyertaan Modal Ke Dalam Anak Perusahaan Yang Dibuat oleh Notaris, ( Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017 )
- Mohamad Besar Niko, Tesis : Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Asset PT Pelindo II (Persero), ( Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018 )

## INTERNET DAN LAIN-LAINNYA

- Abba Gabrilin. 2019. Beda Pendapat soal Ma'ruf Amin dan Status Anak Usaha BUMN diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/11/13322441/beda-pendapat-soal-maruf-amin-dan-status-anak-usaha-bumn> (diakses pada 13 Juli 2019)
- Atikah Ishmah Winahyu, 2019, *BUMN Harus Berada di Bawah Kontrol Presiden*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/254296-bumn-harus-berada-di-bawah-kontrol-presiden> (diakses pada 15 Oktober 2019)
- Anonim tanpa tahun tanpa judul. <http://www.indonesiaport.co.id/> (diakses pada tanggal 16 Mei 2019)
- Anonim, 2015, *BPK Permasalahan BUMN Beralih ke Anak Perusahaan*, diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/bpk-permasalahan-bumn-beralih-ke-anak-perusahaan> (diakses pada 25 September 2019)
- Anonim tanpa tahun POLICY BRIEF ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM POKJA PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN hal. 1 diunduh dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_bumn.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf). (diakses pada 30 April 2019)
- Ali Masykur Musa. 2015. BUMN sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi. diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/956914/168/bumn-sebagai-mesin-pertumbuhan-ekonomi-1422427823>. (diakses pada 30 April 2019)
- Dian Puji Simatupang, 2019, *Diskursus Anak Perusahaan BUMN*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-pujin-simatupang/> (diakses pada 27 September 2019)
- Dony Abdul Chalid, 2010, *BUMN dan Fungsi Kontrol Rakyat*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/02/13/05110779/bumn.dan.fungsi.kontrol.rakyat> (diakses pada 15 Oktober 2019)
- Inda Rahadiyan, 2013, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Jurnal Ius Quia Iustum, Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013
- Mutiara Bintang Pertiwi. 2015. Pengertian, Jenis, Maksud serta Tujuan Berdirinya BUMN. diakses dari <https://www.kompasiana.com/star03/565d2d7d5293730b1ccd72f7/pengertian-jenis-maksud-serta-tujuan-berdirinya-bumn> (diakses pada 13 Mei 2019)
- Richo And Wibowo, 2019, *Anak Perusahaan BUMN Setelah Pemilihan Presiden*, diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1224950/anak-perusahaan-bumn-setelah-pemilihan-presiden/full&view=ok> pada 25 September 2019

- Safrezi Fitra. 2015. 62 Persen Anak Usaha BUMN Berpotensi Merugikan Negara. <https://katadata.co.id/berita/2015/01/16/62-persen-anak-usaha-bumn-berpotensi-merugikan-negara> (diakses pada 13 Juli 2019)
- Sulistiowati, 2011, Limited Liability *dalam* Limited Liability *Pada KONstruksi Perusahaan Kelompok Piramida*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, hal. 253.
- Kuntana Magnar, *et.al.*, 2010, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010
- Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Jasa Armada Indonesia dibuat tanggal 10 Maret 2014 dihadapan notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn